

MEMAKNAI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

The meaning of development concept from the Social Welfare perspective

Agus Budi Purwanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang, Jakarta Timur
e-mail: aguspurwanto5919@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengulas tentang makna konsep pembangunan dalam perspektif kesejahteraan sosial. Gagasan-gagasan tentang pembangunan makin mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan pokok pembangunan. Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, menjadi lebih buruk, meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi. Kapasitas anggaran belanja yang kian besar semestinya memberikan dampak penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan yang semakin besar pula. Kenyataannya justru sebaliknya.

Kata kunci: pembangunan, perspektif kesejahteraan sosial

Abstract

This article explores the meaning of development concept from the Social Welfare perspective. The concepts of development have shifted toward promoting both human dignity and welfare as a whole. The concepts of development have shifted toward promoting both human dignity and welfare as a whole. Development is not considered successful when it fails to alleviate poverty, unemployment and social injustice despite the increase of income per capita. Most of the collective violence theories stated that social economic injustice as one of the cause, directly or indirectly. This is due to the condition when the actor of collective violence has a very high expectation on what they should earn versus what they actually make in terms of money / income. In relation to that, the increase of national budget allocation should create more labour force and minimize the number of poor people. Unfortunately, this ideal seems to be far away to achieve.

Keywords : development, social welfare perspective

PENDAHULUAN

Kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tampaknya bersumber dari masalah struktural. Kemiskinan, kebodohan, perlakuan diskriminatif, pelanggaran HAM, sistem yang timpang dan kurang berpihak pada kelompok lemah, penegakan hukum yang belum memiliki rasa berkeadilan dan kesenjangan ekonomi yang mencolok cenderung melahirkan ketidakberdayaan, kekecewaan dan kemarahan yang berujung pada perilaku agresi. Menurut Erich Fromm dalam *The Anatomy of Human Destructiveness* (1973), sebagaimana dikutip Amalia (2013), kekerasan yang dilakukan

manusia dipicu oleh kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan individu berkembang secara positif. Kondisi ini menghambat tegaknya kepentingan dasar manusia sehingga individu bereaksi untuk mempertahankan eksistensinya. Melakukan tindakan agresi kepada diri sendiri ataupun orang lain. Pendapat Fromm ini setidaknya memberikan gambaran bahwa dorongan agresi yang muncul pada masyarakat Indonesia muncul karena ada faktor yang menstimulinya, yang lebih bersifat reaktif.

Kemiskinan, kebodohan, perlakuan diskriminatif, adanya pelanggaran HAM, sistem yang timpang, hukum yang belum memiliki

rasa berkeadilan, sifat konsumerisme, semua itu cenderung melahirkan ketidakberdayaan, kekecewaan dan kemarahan yang berujung pada perilaku agresi. Tampaknya ada kecenderungan rakyat Indonesia sedang mengalami kekecewaan dan frustrasi akibat lingkungan yang kurang berpihak pada kepentingan eksistensinya. Selain itu juga luapan kejengkelan masyarakat yang tak kunjung mendapat tanggapan atas noda-noda etis para pejabat publik. Kemanapun mata kita alihkan, tayangan tentang kedua hal tersebut terus muncul di televisi, koran, majalah, dan jendela jagat maya. Menurutnya selama ini barisan panjang pemimpin kita dari tingkat nasional sampai daerah dengan sembrono memanipulasi kosakata tanpa pertanggungjawaban. Dengan jalan pendek bernalar mereka justru licin mempermainkan khalayak. Jabatan publik atau politik bagi mereka bukanlah beban yang wajib dipertanggungjawabkan, tetapi dinikmati sebagai anugerah. Dari kata *nikmat* terbentuk verbalisasi aktif ataupun pasif: *menikmati* dan *dinikmati*. Maka, tampillah setiap hari karnaval verbalisasi yang lancang atas berbagai kata dasar demi kepentingan pribadi, keluarga, golongan, dan organisasi sosial politik di muka umum. Masyarakat pada umumnya menjadi penonton yang dari hari ke hari kian memuakkan.

Maraknya kasus korupsi para elite politik, berlarut-larutnya proses hukum sejumlah tersangka kasus korupsi, absennya figure kepemimpinan yang tegas dalam membela kepentingan rakyat, tingkah polah oknum DPR yang kongkalikong dalam proses penganggaran serta menghambur-hamburkan uang rakyat dengan pelesiran ke sejumlah negara (atau dengan dalih studi banding) menumbuhkan perasaan “gregetan” dalam masyarakat.

Korupsi yang kini merajalela di Indonesia, berakar pada masa yang relatif lama, ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” (Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*) yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan, korupsi,

pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang (Mochtar Lubis dan James Scott, 1988). Jelas pula, bahwa nilai-nilai budaya birokrasi patrimonial telah amat ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan kesadaran bangsa kita yang mendambakan birokrasi yang bersih dan jujur, mengabdikan pada kepentingan umum dan seluruh masyarakat. Nilai-nilai budaya birokrasi patrimonial dan masyarakatnya dari abad ke-14 itu malahan akan menimbulkan bencana bagi setiap masyarakat di abad ke-20 ini.

Ditambah lagi faktor pengangguran yang cenderung meningkat, semakin lebarnya jarak sosial ekonomi masyarakat kita, dimana yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin menjadi semakin miskin, menambah amunisi bagi kegeraman dan kemarahan rakyat (Amalia, 2013, h.6). Kekecewaan yang bertubi-tubi ini menjadi penyubur akar perilaku agresif dalam masyarakat. Alhasil jalan kekerasan, anarkis menjadi pilihan untuk menuntaskan kegeraman. Pada kondisi demikian, kemampuan mendasar berupa rasionalitas menjadi tidak berfungsi. Alih-alih berpikir sehat, reaksi yang muncul malah menimbulkan kerusakan, kematian dan kekacauan sosial. Para elite Negara yang korupsi sejatinya juga telah melakukan kekerasan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mereka bertindak agresif dengan mengambil hak-hak rakyat dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak. Nafsu menguasai dan memiliki hak rakyat oleh para elite ini semata-mata demi kesenangan dan kepentingan diri dan golongannya. Dalam bahasa Fromm disebut dengan agresi destruktif.

PEMBAHASAN

Memaknai Pembangunan

Sejak terbitnya tulisan ekonom Inggris, Dudley Seers pada tahun 1969, yang sangat berpengaruh beberapa tahun kemudian, gagasan-gagasan tentang pembangunan makin

mengakomodasi pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan pokok pembangunan. Seers, sebagaimana dikutip Andrinof A Chaniago (2012, h.1,2), mengatakan pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menjadi lebih buruk meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi.

Dekade 1970-an menjadi era paling bergairah dalam sejarah perkembangan konsep pembangunan di dunia, tak terkecuali di negara Indonesia. Pada dekade ini, Dudley Seers patut kita tempatkan sebagai orang terhormat dalam sejarah pemikiran tentang pembangunan. Menyusul pemikiran yang ditulisnya pada tahun 1969, karya-karya Seers berikutnya mempertegas definisinya yang didukung banyak orang tentang arti pembangunan yang memberi perhatian serius pada masalah kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (baca: Chaniago, 2012). Dudley Seers adalah ahli ekonomi negara maju pertama yang meletakkan pembangunan manusia dan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Pada dekade ini pula Bank Dunia yang merupakan lembaga multilateral paling berpengaruh terhadap pembangunan negara-negara berkembang menekankan tujuan pembangunan yang mengandung antitesa terhadap definisi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Di bawah kepemimpinan Robert S. McNamara, Bank Dunia tidak lagi hanya memberi perhatian pada mobilisasi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi negara-negara berkembang, tetapi juga menekankan pada tujuan-tujuan sosial seperti memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan (Andrinof A Chaniago, 2012).

Namun demikian, Dudley Seers maupun Robert S. McNamara, pada masa tahun 1970-an mungkin hanya melihat pentingnya pemerataan

dalam pembangunan sebatas mewujudkan harmoni antarkelas sosial di suatu negara atau masyarakat. Sementara itu, kalau kita simak pendapat para ahli ilmu sosial yang menaruh perhatian besar pada masalah-masalah pembangunan, letak masalah ketimpangan sosial-ekonomi bukan saja sebagai sasaran akhir yang harus dicapai, melainkan hal yang harus dicegah untuk kelangsungan pembangunan itu sendiri. Sebagian besar dari teori-teori tentang kekerasan kolektif jelas menempatkan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai faktor penyebab, baik langsung maupun tidak langsung. Ted Robert Gurr, misalnya: mengingatkan kita bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi sebagai pendorong terjadinya kekerasan kolektif karena pelaku kekerasan kolektif itu menilai apa yang mereka dapatkan sangat rendah dari apa yang mereka harapkan (Dipak K.Gupta, 1990, dalam Chaniago, 2012, h. 3).

Menarik untuk disimak pandangan Ahmad Erani Yustika (2013), Dewan Nasional Forum untuk Transparansi Anggaran (Fitra), yang mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 dan tahun 2013 tidak pro rakyat. Jika pemerintah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun antara lain atas pedoman *pro poor* dan *pro job creation*, kenyataannya justru sebaliknya. *Pro poor* (pro kemiskinan) dan *pro job creation* (pro penciptaan lapangan kerja) adalah salah satu pedoman penyusunan APBN selama beberapa tahun ini termasuk untuk tahun 2013. Maksudnya anggaran disusun dengan orientasi untuk antara lain menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Kompas, 7/1/2013). Menurut Erani, kapisitas anggaran belanja yang kian besar semestinya memberikan dampak penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan yang semakin besar pula. Kenyataannya justru sebaliknya, pengurangan tingkat kemiskinan selama 2002-2012 dengan anggaran Rp 460 trilliun, hanya mencapai 6 persen. Sementara pada periode yang sama,

Vietnam dengan anggaran yang lebih kecil berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sampai 19 persen. Tahun 2012, selama Maret-September, jumlah penduduk miskin hanya berkurang 0,3 persen. Hasil itu sangat sedikit sekali dibandingkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang ada.

Penciptaan lapangan kerja menurut Erani (2013), semakin menurun yang ukurannya adalah dampak setiap satu persen pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2010, satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 400.000 orang tenaga kerja. Tahun 2011 dan 2012 menurun menjadi 250.000 orang dan 180.000 orang. APBN yang tidak pro rakyat juga terkonfirmasi dari semakin lebarnya kesenjangan. Ini ditunjukkan dengan rasio gini Indonesia berturut-turut selama 2009-2011 adalah 0,37, 0,38, dan 0,41. Rasio gini menunjukkan proporsi penduduk yang menikmati pendapatan dan kekayaan, Indeks gini 0,41 persen menunjukkan bahwa 1 persen penduduk menguasai hingga 41 persen total kekayaan di Indonesia. Rasio gini menggunakan perhitungan belanja. Jika menggunakan perhitungan pendapatan diperkirakan kesenjangan bisa makin melebar, yakni mencapai 0,6.

Menurut BPS angka kemiskinan September 2012 turun menjadi 11,66 persen dari 12,36 persen pada September 2011. Dari segi jumlah, penduduk yang terkategori miskin berkurang dari 29,89 juta (2011) menjadi 28,59 juta, dengan garis kemiskinan (pengeluaran per orang per bulan) sebesar Rp 259,520 untuk September 2012 (Hendri Saparini, 2013, h.8). Menurut Saparini, rendahnya kinerja Indonesia dalam penghapusan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat akan terlihat jelas saat membandingkan dengan kinerja negara lain. Cina, misalnya, prestasi dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan penduduk sangat jauh lebih maju. Data Bank Dunia menyatakan, pada 2005, penduduk Cina

dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari sebesar 36,3 persen. Data lain menyebutkan pada 1985, jumlah penduduk miskin masih sekitar 65 persen. Sementara di Indonesia, yang memulai pembangunan ekonomi lebih dulu, ternyata pada 2009 jumlah penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari masih sebesar 50,9 persen (baca: Saparini, 2013, h. 8).

Di Indonesia, tingkat kemiskinan rata-rata nasional menurun, dari 13,3 persen (2010) menjadi 12,5 persen (2011). Penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut tipis, dari 12,59 persen (Maret 2011) menjadi 12,36 persen (September 2011). Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan sekitar separuh di bawah rata-rata nasional (September 2011) adalah DKI Jakarta 3,64 persen, Bali 4,59 persen, Bangka Belitung 5,16 persen, Kalimantan Selatan 5,35 persen, Banten 6,26 persen, Kalimantan Timur 6,68 persen. Semua menurun sangat tipis dibanding angka Maret 2011, kecuali Kalimantan Selatan (Sri-Edi Swasono, 2012, h. 6). Sebaliknya provinsi-provinsi yang angka kemiskinannya lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional (September 2011) adalah Papua 31,24 persen, Papua Barat 28,53 persen dan yang lebih dari satu setengah kali lipat rata-rata nasional adalah Maluku 22,45 persen, Nusa Tenggara Timur 20,48 persen, Nusa Tenggara Barat 19,67 persen, dan Aceh 19,48 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem “provinsi-provinsi tertinggal” ini menurun tipis dibanding angka-angka Maret 2011. Angka kemiskinan yang terus menurun tipis ini perlu kita hargai, meskipun persepsi masyarakat sering sebaliknya (Swasono, 2012, h.6).

Pengangguran juga menurun dari 6,8 persen (2011) menjadi 6,32 persen (2012) menurun sebanyak 420.000 orang. Ini tidak berarti andaikata tiap tahun dapat diciptakan 420.000 lapangan kerja dalam 18 tahun terwujud angkatan kerja tanpa penganggur. Namun, Ketua Umum Kadin menegaskan sebaliknya, akibat kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan

kerja, pengangguran justru meningkat 1,3 juta orang, pengangguran mencapai 9 juta orang (Swasono, 2012).

Laporan diskusi panel Kompas (8/1) dengan thema, “Menyusun Konsensus Baru” dirasa cukup menarik. Dalam laporan itu dibahas peran negara, cita-cita keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam, cita-cita negara kesejahteraan, pengentasan rakyat miskin, dan ketenagakerjaan. Semua itu sebenarnya sudah merupakan pembicaraan sejak Negara ini didirikan (Sulastomo, 2013, h.7). Mengesankan karena konsesus baru itu merupakan otokritik, menyadari kondisi bangsa yang masih jauh dari cita-cita pendiri bangsa ini. Konsensus baru itu dengan demikian merupakan ajakan untuk kembali ke cita-cita UUD 1945, ajakan untuk kembali ke khittah buat apa Negara ini didirikan.

Perjalanan bangsa ini, meski telah memasuki 67 tahun merdeka, selalu mengalami gelombang pasang surut yang sering drastis sehingga jalannya penyelenggaraan negara tidak konsisten. Hal ini sudah tentu berdampak pada pencapaian tujuan bernegara yang kurang optimal. Tatanan kenegaraan kita pernah menganut sistem parlementer yang kehidupan politiknya sangat dinamis, kabinet jatuh bangun dalam hitungan bulan, sehingga melahirkan instabilitas politik dan pergolakan daerah yang hendak memisahkan diri.

Pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi disertai perubahan UUD 1945 pada 2002. Sejak itu kita memasuki era baru, demokratisasi, otonomi daerah serta keterbukaan ekonomi dan politik. Menurut Novri Susan (2013;6) bahwa ciri umum pembangunan Indonesia saat ini, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, adalah elitis, lamban dan belum merefleksikan kepentingan umum. Pembangunan sosial ekonomi sering dipenuhi konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan. Terutama konflik kepentingan dalam mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Fenomena sosiologis yang sering

muncul adalah kelompok kepentingan yang memiliki modal ekonomi politik lebih besar cenderung mendominasi konflik. Selama periode demokrasi Indonesia, konflik atas pembangunan didominasi oleh kelompok pemodal besar dengan dukungan sebagian elite pemerintahan. Elite-elite pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, terindikasi mendukung kelompok-kelompok modal besar. Dukungan itu memperkuat dominasi untuk bisa melakukan praktik utilisasi pembangunan.

Dominasi kepentingan kelompok modal besar dan sebagian elite pemerintahan dalam konflik pembangunan merupakan virus yang merusak kinerja ideal demokrasi. Pada kondisi tersebut, keberpihakan politik untuk menghapus dominasi kepentingan merupakan kebutuhan tidak bisa ditawar lagi (Novri Susan, 2013, h. 6). Oleh karena itu, Indonesia butuh kepemimpinan politik yang berani dan tekun mempraktikkan dekonstruksi dominasi kepentingan atas pembangunan oleh kepentingan-kepentingan sektional. Praktik dekonstruksi dominasi itu harus muncul dalam bentuk pemosisian politik di tengah-tengah masyarakat akar rumput. Dekonstruksi dominasi juga membangun keterbukaan dalam setiap perumusan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Bagaimana masyarakat dan pemerintah Indonesia akan menjawab berbagai masalah sosial yang akan semakin berkembang menyusul ekspansi penetrasi liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini. Apakah sistem kesejahteraan sosial tradisional masih akan dapat berfungsi efektif untuk memecahkan masalah-masalah sosial di dalam konteks ekonomi pasar yang akan semakin marak. Bagaimana sistem kesejahteraan nasional harus menanggapi ketegangan-ketegangan yang akan terjadi semakin keras antara tuntutan sistem kesejahteraan sosial “residual” dan sistem kesejahteraan sosial “institusional” dihadapan persaingan pasar bebas yang akan semakin keras?

(Nasikun, 1999). Apa implikasi semua itu bagi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Itulah beberapa pertanyaan sangat mendasar yang akan kita hadapi semakin nyata memasuki era dewasa ini dan yang akan datang. Selanjutnya perlu diberi perhatian juga bagaimana suatu sistem kesejahteraan sosial nasional harus dirumuskan untuk menjawab proses produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial yang akan semakin “*inheren*” di dalam masyarakat dihadapan dinamika ekonomi pasar bebas yang akan semakin keras. Akhirnya diperlukan untuk meletakkan perhatian awal bagi pemahaman tentang dinamika produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial di masa mendatang, perumusan “arah dasar” pengembangan kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial menghadapi era liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini, dan yang tidak kalah pentingnya implikasi perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Pekerja Sosial yang diperlukan untuk mendukung pengelolaannya.

Bahwa di era liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini dan mendatang yang akan dihadapi masyarakat Indonesia bukan hanya meningkatnya masalah kemiskinan seperti biasa kita pahami selama ini, melainkan produksi dan reproduksi beragam masalah sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya jumlah lapisan penduduk usia lanjut, semakin maraknya beragam bentuk penyimpangan sosial, dan tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya “pembelotan sipil” (*civil disobedience*). Semua itu yang selama ini hanya kita pahami samar-samar sebagai fenomena-fenomena darurat yang bersifat temporer dan berskala kecil, di masa mendatang akan semakin menjadi ciri *inheren* dari masyarakat dan ekonomi Indonesia (Nasikun, 1999). Kedua, di dalam konteks keseluruhan kompleksitas masalah yang demikian, masalah-masalah sosial tidak dapat lagi ditangani melalui program-program parsial seperti yang selama ini dilakukan. Sebaliknya, di dalam era liberalisasi global yang akan datang,

masalah-masalah sosial harus ditangani melalui pengembangan suatu sistem kesejahteraan sosial nasional yang benar-benar terpadu. Ketiga, di dalam konteks korporatisme negara yang sudah sangat berkembang selama ini, dilema dan ketegangan pilihan pendekatan kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial akan terjadi antara pilihan pendekatan “*residual*” untuk melindungi bekerjanya mekanisme pasar bebas dari campur tangan pertimbangan-pertimbangan politik di satu sisi, dan pilihan pendekatan “*institusional*” untuk melindungi hak-hak warga negara dari ketidakadilan mekanisme ekonomi pasar bebas di sisi yang lain. Keempat, meningkatnya “*magnitude*” masalah-masalah sosial di masa mendatang, sebaliknya akan semakin menuntut pilihan pendekatan institusional didalam perumusan kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial dan program-program anti kemiskinan (Nasikun, 1999)

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakarakan pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literatur mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan (Hardiman dan Midgley, 1982, dalam Justika Baharsyah, 1999, h.39). Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusatkan pada rakyat, maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sepintas telah disinggung bahwa sejak tahun 1980-an, setelah banyak negara berkembang mengalami distorsi pembangunan, maka pembangunan sosial mulai mendapat prioritas. Padahal sebelum itu, pemecahan sosial

umumnya dilakukan melalui mekanisme pasar sebagaimana ciri negara-negara kapitalis. Pada hakekatnya tidak pernah ditemukan konsep pembangunan kesejahteraan sosial karena secara internasional ia bukanlah sektor atau subsektor dari pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial adalah tujuan dan kondisi sebagai “buah” pembangunan. Tidak heran jika kemudian kesejahteraan sosial menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa (baca: Justika Baharsyah, 1999, h. 48). Di Indonesia, istilah pembangunan kesejahteraan sosial lahir sebagai dampak dari kebijakan penempatan kesejahteraan sosial sebagai sebuah subsektor dari sektor kesejahteraan rakyat. Sebagai subsektor, pembangunan kesejahteraan sosial lebih berperan menangani masalah-masalah marjinal dan residual.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Perspektif pembangunan sosial mencakup kondisi masyarakat secara komprehensif dengan fokus masyarakat. Ia juga merupakan intervensi yang direncanakan, mendukung pendekatan universal dan keharmonisan antara intervensi sosial dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan sosial merupakan pendekatan terpadu antara tujuan ekonomi dengan tujuan sosial, yang merupakan upaya aktif memadukan pembangunan ekonomi dan sosial sebagai bagian integral. Sehubungan dengan hal tersebut, Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) mengungkapkan meskipun telah terjadi capaian-capaian yang hebat dari masyarakat industri barat yang modern, namun sangatlah jelas kalau orde sosial, ekonomi, dan politik saat ini tidak sanggup memenuhi dua prasyarat yang paling mendasar dari peradaban manusia: kebutuhan manusia untuk dapat hidup secara harmonis dengan lingkungannya, serta kebutuhan manusia

untuk dapat hidup harmonis dengan sesama manusia. Jika kedua kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, dalam jangka panjang capaian-capaian dan manfaat-manfaat dari masyarakat modern akan menjadi fana.

Ketidaksanggupan dari orde dominan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dapat dilihat dalam krisis yang saat ini dihadapi bukan hanya oleh masyarakat industri barat tetapi semua masyarakat di dunia. Dunia dicirikan oleh ketidakstabilan yang meningkat secara ekologis, ekonomis, politik, sosial atau kultural dan lembaga-lembaga yang ada tampaknya hanya sanggup memberikan solusi-solusi yang dalam jangka panjang dan bahkan dalam jangka pendek, hanya memperburuk keadaan. Jadi pendekatan satu dimensi, misalnya ekonomi, kepada pengembangan masyarakat akan berpeluang besar menemui kegagalan dalam pengertian keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, disini diperlukan suatu bentuk pengembangan masyarakat terpadu yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, kultural, lingkungan hidup dan spiritual. Semua itu untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai pembangunan yang seimbang.

KESIMPULAN

Meskipun berbagai data statistik menunjukkan peningkatan pendapatan rakyat, penurunan angka pengangguran, dan perluasan lapangan kerja, masih banyak kelompok masyarakat, seperti petani gurem, buruh tani, buruh pabrik, buruh nelayan, nelayan kecil, pedagang kaki lima yang menderita atau termarginalkan. Hampir setiap hari begitu banyak terekam kisah nestap orang-orang miskin yang mengusik rasa kemanusiaan kita di negeri merdeka dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah.

Marciano Vidal sebagaimana dikutip Aloys Budi Purnomo (2011, h. 6) mengungkapkan, karakteristik negara kesejahteraan ditandai oleh

empat hal pokok. Pertama, komitmen Negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga Negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah, bermutu bagi rakyat, termasuk jaminan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, tetapi berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh-sungguh cerminan wajah solidaritas baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekadar obat untuk menyembuhkan kesenjangan sosial.

Mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan adalah tugas para pemimpin bangsa. Mereka bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil dan sejahtera. Negara dan penyelenggara negara bertanggungjawab menyelenggarakan semua pelayanan publik sehingga standar kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi, tanpa mengecualikan seorang pun. Kegagalan para pemimpin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat merupakan kegagalan mereka dalam menyelenggarakan amanah yang diembannya. Selama ini ada kecenderungan yang terjadi, bukannya masyarakat mencontoh para pemimpinnya dalam hal saling melindungi antar warga, melainkan justru rakyatlah yang memberikan contoh kepada para pemimpin dalam mengembangkan antusiasme solidaritas kewarganegaraan. Aparatur Negara selalu terlambat mewujudkan solidaritas dibandingkan warga masyarakat merespon berbagai persoalan di tingkat akar rumput. Adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, aparatur negara dan para pemimpinnya untuk mewujudkan keempat karakteristik negara kesejahteraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloys Budi Purnomo. (2011, November 7). Solidarisme dan Negara Kesejahteraan. *Kompas*.
- Chaniago, Andrinof A. (2012). *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ainna Amalia, FN. (2013, Januari 7). Bangsa Penuh Amarah. *Kompas*.
- Hendri Saporini. (2013). Mempercepat Penghapusan Kemiskinan. *Media Indonesia*.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kurnia, J. (2013, Januari 5). Kerja Bukan Verba. *Kompas*.
- Lubis, Mochtar dan James, C. Scott. (1988). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Nasikun. (1999). *Menuju Suatu Sistem Kesejahteraan Sosial Institusional Melalui Pengembangan SDM Pekerja Sosial*. Makalah Balatbangsos, BDPTS, Depsos, Yogyakarta.
- Novri Susan. (2013, Februari 11). Mengelola Konflik Pembangunan. *Kompas*.
- Swasono, Sri Edi. (2012, Juli 28). Kemiskinan dan Pengangguran. *Kompas*.
- Sulastomo, (2013 Januari 16). Kembali Ke Khitoh. *Kompas*.
- Yustika S., Baharsyah. (1999). *Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial, Pelajaran dari Krisis*. Jakarta: Depsos.